

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul **“Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946-1950)”**. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Latar Belakang Berdirinya Daerah Istimewa Kalimantan Barat. 2) Bagaimana Bentuk Sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. 3) Bagaimana Akhir Dari Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Kalimantan Barat, IKIP-PGRI Pontianak dan peneliti terhadap sejarah lokal yang ada diwilayah Kalimantan Barat.

Dalam penelitian ini, untuk menghindari penyimpangan dari fokus permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan pembatasan ruang lingkup penelitian agar tetap pada pokok pembahasan masalah. Penelitian ini adalah penelitian sejarah maka peneliti menggunakan metode sejarah yang ditulis dengan deskriptif analitis dengan langkah atau tahapan, yaitu : 1) *Heuristik* (pengumpulan sumber), 2) Kritik sumber, 3) *Interprestasi* (penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah), 4) *Historiografi* (penulisan sejarah). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data-data menggunakan metode sumber sekunder dan tradisi lisan di dalam *heuristik* dengan menggunakan metode sejarah lisan.

Dari hasil penelitian, Daerah Istimewa Kalimantan Barat merupakan satuan ketatanegaraan yang tegak berdiri sendiri didalam federasi Republik Indonesia Serikat. Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada 22 Oktober 1946 berdasarkan putusan seluruh kerajaan yang ada di Kalimantan Barat dan Sultan Hamid II menjadi Kepala Daerah. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibagi dalam 12 Swapraja (pemerintahan sendiri) dan 3 Neo Swapraja, Daerah Istimewa Kalimantan Barat diresmikan pada 12 Mei 1947. DIKB diresmikan oleh Sultan Hamid II beserta Dewan Pemerintah Harian (BPH) dikantor Residen Pontianak. Pada peresmian itu hadir pula beberapa orang perwakilan dari Negara Belanda untuk mengakui keberadaan DIKB sebagai satuan ketatanegaraan yang tegak berdiri sendiri yaitu Letnan Gubernur Jendral Hindia Belanda H.J Van Mook, Perdana Menteri Belanda Dr. Beel dan Mr. Jonkman. Pemerintahan DIKB berjalan hingga penyerahan kedaulatan RIS di Den Haag Belanda pada 27 Desember 1949 dan kemudian terjadi pemberontakan kaum republikan yang menuntut pembubaran DIKB dan menginginkan tergabung kedalam Republik Indonesia. seperti Dr. Soedarso, Alianjang dan S.H Marpaung. Tentara Republik kemudian pada awal 1950 mendarat di Pontianak dan membakar bangunan – bangunan yang dianggap hasil peninggalan

Belanda. Pada tahun 1951, keluarlah surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/10 yang mencakup segala ketentuan tentang pembagian secara administratif daerah Kalimantan Barat yang dahulunya dikenal dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat kedalam 6 daerah Kabupaten administratif yakni Pontianak, Ketapang, Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan sebuah daerah Kota Administratif Pontianak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain supaya terus menggali data-data mengenai Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang masih tersisa untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya, Bagi generasi muda khususnya di Kalimantan Barat, tetap aktif untuk membantu melestarikan cita-cita serta pengorbanan para tokoh pejuang untuk kemajuan Kalimantan Barat. Selain itu banyak kisah sejarah yang ada di Kalimantan Barat yang belum digali dan mendapatkan perhatian untuk dikembangkan.

